



Analisis Perbandingan Penerapan *Cash Basis* dengan *Accrual Basis* dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus pada Satuan Kerja Direktorat Rumah Umum dan Komersial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Dewi Nisa Amaliah^{1*}, M. Nur Afif², Ayi Jamaludin Aziz³

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda, Indonesia

Alamat : Jl. Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720

Author Korespondensi: dewi.nisa2019@unida.ac.id

Abstract Presentation of government financial reports can be done on a cash basis and accrual basis. A qualitative descriptive method is used in this study. In this study, the author uses concepts in Government Accounting Standards (SAP), and is supported by the interview and documentation methods used. The focus of the research is recognition, recording and reporting. The study's findings demonstrate the disparities between the accrual and cash bases in the financial reports presented, such as in the cash basis there are 4 (four) financial report components such as the cash flow, balance sheet, and budget realisation report (LRA) Report (LAK) and Notes to the Report Finance (CaLK). Meanwhile, in the accrual basis there are 5 (five) components balance sheet, operational report (LO), budget realisation report (LRA), report on changes in equity (LPE), and notes to financial reports (CaLK) are the five types of financial reports. On the accrual basis, there is an Excess Operational Report (LO) and Budget Balance Report (SAL) which are not presented in the Report using a cash basis, in presenting the Report on Budget Realisation (LRA) it still uses a cash basis, while the Balance Sheet already uses an accrual basis.

Keywords: Cash Basis, Accrual Basis, Presentation of Financial Statement

Abstrak Penyajian laporan keuangan pemerintahan dapat dilakukan dengan *cash basis* dan *accrual basis*. Studi ini memakai pendekatan kualitatif deskripsi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan unsur-unsur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan didorong oleh teknik interview serta catatan yang digunakan. Fokus penelitian adalah pengakuan, catatan serta laporan. Hasil studi menggambarakan jika *cash basis* serta *accrual basis* mempunyai perbandingan di catatan finansial yang tersaji, misalnya *cash basis* memiliki 4 unsur catatan finansial seperti catatan realisasi bujet, neraca, catatan arus kas serta catatan atas laporan finansial. Sementara pada *accrual basis* memiliki 5 unsur catatan finansial seperti catatan realisasi bujet, neraca, catatan operasional (LO) laporan berubahnya ekuitas, serta catatan atas laporan finansial. *Accrual basis* mempunyai catatan sisa bujet berlebih serta catatan pengoperasian yang bukan tersaji pada catatan yang memakai *cash basis*, penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memakai *cash basis*, sementara neraca sudah memakai *accrual basis*.

Kata Kunci: Basis Kas, Basis Akrual, Penyajian Laporan Keuangan

1. PENDAHULUAN

Dalam memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada pengguna laporan, tak terkecuali pemerintahan harus menyampaikan laporan keuangan dengan baik dan akurat (Khatami et al., 2024). Pengelolaan keuangan negara yang baik, pertumbuhan ekonomi akan berjalan lancar. Menurut UU No.17 Tahun 2003 Mengenai Keuangan Negara, khususnya pasal 1 ayat 1, keuangan negara terdiri dari seluruh kepemilikan serta tanggung jawab negara yang dapat penilaian secara moneter, dan seluruh suatu baik dalam bentuk biaya ataupun produk yang bisa dimiliki negara terkait melalui pelaksanaan kepemilikan serta tanggung jawab itu.

Indonesia secara historis tidak memiliki akuntansi pemerintahan yang sangat berkembang (Simanjuntak, 2005).

Pada tahun 2003, penyelenggaraan finansial kenegaraan dilaksanakan melalui dokumentasi tunggal melalui *cash basis*. Saat itu, akuntansi pemerintahan amatlah sederhana, misalnya pelaporan kekurangan, pelaporan kondisi kas, serta pelaporan kondisi nilai anggaran. Kelebihan akuntansi *cash basis* adalah mudah digunakan serta dapat dipahami. Namun, dikarenakan hanya berisi dokumentasi mengenai penerimaan, keluaran serta saldo kas, serta bukan memberi catatan mengenai aktiva serta hutang, itu juga kurang informatif. Pemerintah harus menunjukkan asetnya dalam posisi finansial, hanya bisa dibentuk melalui *accrual basis*, sebagai lembaga negara yang mengatur keuangan negara.

Otoritas menghasilkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang berkewajiban semua instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah otonomi, untuk menggunakan akuntansi berbasis akrual. Hal ini mendorong pemerintahan otonomi untuk memaksimalkan pendapatannya (Joko et al., 2019). Ini dibuat untuk mengurangi kerendahan akuntansi *cash basis* serta membuat finansial negara paling jelas. Pasal 36 ayat (1) mengatakan jika “pengesahan serta ukuran penghasilan serta pembelanjaan *accrual basis* dilakukan secepat-cepatnya dalam 5 tahun.” Ini berarti jika pemerintahan harus mulai menggunakan akuntansi pemerintah *accrual basis* dalam waktu 5 tahun terhitung UU itu diterbitkan, ataupun di tahun 2008.

Pemerintah mengganti PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah melalui PP No 71 Tahun 2010. Menurut PP, akuntansi pemerintahan Indonesia memakai *cash basis* menghadap *accrual* berarti bahwa sumber daya, hutang serta hak dicatat pada neraca melalui *accrual basis* dan penghasilan, belanja serta pembiayaan didokumentasi dalam Laporan Realisasi Anggaran. Menurut PP No 71 Tahun 2010, diterapkannya SAP *accrual basis* bisa dimulai melalui tahapan.

Satu diantara instansi akuntansi dibagian Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat adalah Unit Kerja Direktorat Perumahan serta Komersial. Unit ini bertanggung jawab untuk penyelenggaraan akuntansi serta pelaporan tanggung jawab pada penerapan anggaran penghasilan serta pembelanjaan negara melalui penyusunan pelaporan finansial seperti Neraca, catatan perubahan ekuitas, catatan operasional dan Catatan atas pelaporan keuangan.

Sama halnya dengan PMK 2005/PMK.011/2012 mengenai Organisasi serta Tata Kerja Instansi Vertikal, Satuan Kerja Direktorat Rumah Umum dan Komersial dibentuk sebagai usaha pemerintahan dalam meningkatkan mutu catatan keuangan kementerian negara atau organisasi. Kebijakan pemerintahan No 71 Tahun 2020 mengenai Standar Akuntansi

Pemerintah digunakan untuk mengganti aturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005. Walaupun ada beberapa hambatan, Satuan Kerja Direktorat Rumah Umum dan Komersial telah berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan basis akrual. Ini termasuk kesulitan memahami perubahan konstan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang rumit.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah mencakup catatan, klasifikasi serta laporan berbagai negosiasi finansial yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam mengelola anggaran publik. (Baswir, 2000) mengatakan jika akuntansi pemerintah (akuntansi dalam instansi tanpa keuntungan) adalah bagian akuntansi menangani pemerintahan dan organisasi nonprofit lainnya. Meskipun instansi pemerintah selalu berukuran besar, mereka dianggap sebagai lembaga mikro berdasarkan ukuran perusahaan.

Tujuan akuntansi pemerintah adalah untuk membuat pengelolaan keuangan publik lebih jelas. Masyarakat dapat melihat bagaimana uang pajak mereka digunakan dengan mencatat dan melaporkan semua transaksi.

1. Tujuan akuntabilitas, akuntansi otoritas disusun dalam terpenuhinya pelaporan kewajiban finansial negara.
2. Tujuan manajerial, akuntansi pemerintah mengharuskan pemerintah melaksanakan rencana susunan APBN serta prosedur pembentukan.
3. Tujuan pengawasan, akuntansi pemerintah dirancang pada mempermudah alur pemeriksaan keuangan negara.

Akuntansi pemerintahan disusun berdasarkan kebutuhan penyusunan laporan keuangan bagi sektor publik atau pemerintahan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk tergantinya aturan otoritas No.24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan aturan otoritas No.71 Tahun 2010. Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), diantaranya mengenai PSAP bersama melalui prakata SAP serta penyusunan membentuk pada kerangka konsep akuntansi otoritas yang mengatur mengenai pengakuan, pendapatan dan pengungkapan (Setiawan & Rizki Putra Tami, 2018).

Menurut UU No.17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, pasal 30 ayat (1) menyatakan jika presiden melaporkan pada DPR catatan keuangan yang sudah diperiksa pada BPK tentang pelaksanaan APBN, serta pasal 31 ayat (1) dan (2) menyatakan jika catatan tanggungjawab itu harus dibuat serta tersaji penyesuaian melalui SAP. Peraturan pemerintah

menetapkan jika SAP dibuat satu komite prosedur yang independensi serta penetapan sesudah lebih dahulu memperoleh persetujuan daripada komite tersebut.

Basis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Akuntansi Berbasis Kas

Cash basis ialah satu diantara dasar dalam pencatatan akuntansi. SAP berbasis kas dalam praktik catatan anggaran dipakai dalam mengakui penghasilan, pembelanjaan serta biaya dalam praktik catatan anggaran serta *accrual basis* dalam legalisasi aset. Menurut PP No.71 Tahun 2020, SAP *cash basis* ini berarti penghasilan diakui saat diterimanya kas pada rekening kas negara ataupun instansi laporan, serta pengakuan pembelanjaan di ketika pengeluaran kas dari rekening kas negara ataupun instansi laporan.

Biaya dan pendapatan dicatat pada saat transaksi terjadi, tidak peduli apakah ada penerimaan atau pengeluaran kas. Menurut (Cudia, 2008), kas akuntansi dicatat penghasilan saat diterimanya serta biaya terbayarkan. *Cash basis* menunjukkan biaya yang bersumber dan diperoleh pada waktu tertentu, bagaimana pembiayaan tersebut digunakan serta saldo kas di periode catatan.

Akuntansi Berbasis Akrua

Menurut PSAP 01, *accrual basis* ialah asas akuntansi yang diakuinya dampak negosiasi serta kejadian lain saat terjadinya bukan memperhatikan kapan kas ataupun sama dengan diterimanya atau dibayarnya kas. Menurut (Sudaryati, 2020) akuntansi berbasis akrual berarti satu basis akuntansi dimana negosiasi ekonomi serta kejadian lainnya dicatat dan dilaporkan saat transaksi terjadi, tidak pada saat kas ataupun seimbang diterimanya kas.

Berlandaskan *cash basis* bisa penetapan dalam anggaran APBN, SAP *accrual cash* ini dipakai dalam mengesahkan penghasilan, biaya, aset, hutang, serta ekuitas pada laporan keuangan basisnya akrual dan untuk diakuinya penghasilan, pembiayaan serta pembelanjaan pada laporan terlaksananya bujet.

Laporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan finansial pemerintahan ialah catatan pertanggungjawaban dilaksanakannya anggaran penghasilan serta pembelanjaan negara yang diantaranya daripada catatan realisasi anggaran, catatan arus kas, neraca serta catatan pelaporan finansial yang tersusun sama dengan SAP. Catatan finansial menunjukkan posisi keuangan dari semua negosiasi yang dilaksanakan pada satu instansi pada waktu laporan (Listiani et al., 2017). Catatan finansial juga dilaksanakan dalam mengetahui berapa banyak bersumber finansial yang digunakan dalam

melakukan aktivitas pengoperasian instansi, penilaian keadaan finansial dan penilaian seberapa efektif serta efisien dalam catatan instansi (Setiawan & E. Surtini, 2017).

Berlandaskan aturan pemerintah No. 71 mengenai SAP, unsur catatan finansial *accrual basis* diantaranya catatan terlaksananya anggaran serta pelaporan keuangan, diantaranya ialah:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah catatan yang memberikan dokumentasi tentang penganggaran serta perwujudan penghasilan, pembelanjaan, defisit serta biaya untuk satu catatan instansi. LRA ialah pelaporan yang membandingkan perwujudan penghasilan serta pembelanjaan pada perkiraan penghasilan serta pagu perwujudan yang sudah ditetapkan di awal periode. Dalam konteks pemerintahan, anggaran dapat dikategorikan sebagai pengukuran ekonomi dalam pengalokasian untuk membiayai kegiatan tertentu ((Setiawan & C. Avrilivanni, 2020).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Sisa bujet paling awal, atau sisa periode sebelumnya, pemakaian saldo bujet berlebih, saldo lebih atau kurangnya biaya bujet periode berjalan, perbaikan penyimpanan pembukuan periode terdahulu serta informasi lainnya disajikan dalam LP-SAL.

3. Laporan Operasional (LO)

LO menunjukkan seluruh aktivitas pengoperasian finansial instansi laporan. Ini ditunjukkan pada penghasilan-LO, biaya serta defisit pengoperasian yang disandingkan melalui penyajian tahun terdahulu.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menampilkan setidak-tidaknya pos ekuitas dahulu ataupun ekuitas periode terdahulu, kekurangan LO pada tahun bersangkutan serta perbaikan secara langsung ditambah atau dikurangnya ekuitas.

5. Neraca

Dalam neraca, setiap entitas menunjukkan aktiva, tanggungjawab serta ekuitasnya diwaktu tertentu. Mereka juga menunjukkan asetnya seperti aktiva lancar serta nonlancar serta kewajibannya sebagai tanggungjawab jangka pendek serta panjang.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

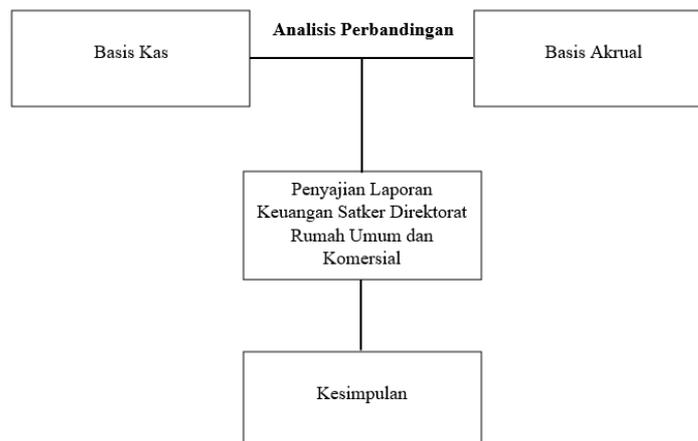
Bagian dari catatan finansial yang disebut catatan arus kas tersajinya catatan tentang diterimanya serta dikeluarkannya uang pada tahun tertentu, dikategorikan berlandaskan kegiatan operasional, pemodalan, kapitalisasi serta transisi.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK seperti uraian ataupun jadwal rinci dan analisa atas penilaian suatu pos yang tersaji pada LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Kerangka Pemikiran

Untuk membuat penelitian lebih mudah dipahami, perlu disusun dalam bentuk skematis yang akan memberikan garis besar dari penelitian. Secara garis besar, penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan antara faktor akan dijadikan penelitian, maka dengan teoritis hubungan anantara faktor bebas serta terikat.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Objek akan diteliti Komparasi Pelaksanaan basis kas serta basis akrual dalam penyusunan catatan finansial pada Satuan Kerja Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Dirjen PUPR. Penelitian ini dirancang untuk melakukan analisis deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, pengamatan serta pencacatan. Berikut langkah analisis data saat penelitian dilakukan:

1. Mengumpulkan informasi agar didapatkan informasi untuk kebutuhan pada studi.
2. Mereduksi data dengan simplikasi, pengelompokkan serta menghapus informasi yang tidak dibutuhkan maka informasi yang tersaji bisa memberikan catatan yang lebih terfokus.
3. Mendeskripsikan *Cash Basis* dan *Accrual Basis* kemudian melaksanakan komparasi antar tersajinya catatan finansial yang memakai *Cash Basis* serta *Accrual Basis*.
4. Menarik ringkasan perbandingan penyajian laporan keuangan yang menggunakan *Cash Basis* dan *Accrual Basis*.

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Satu diantara instansi akuntansi dibawah Kementerian PUPR adalah Unit Kerja Direktorat Perumahan serta Umum. Unit ini bertanggung jawab untuk terselenggaranya akuntansi serta catatan kewajiban atas dilakukannya bujet penghasilan serta pembelanjaan instansi melalui penyusunan catatan finansial seperti catatan realisasi bujet, catatan pengoperasian, catatan diubahnya ekuitas, neraca serta informasi atas catatan finansial.

Sama dengan PMK 2005/PMK.011/2012 mengenai Organisasi serta Tata Kerja Instansi Vertikal, Satuan Kerja Direktorat Rumah Umum dan Komersial dibentuk sebagai usaha instansi dalam peningkatan mutu catatan finansial Kementerian atau instansi. Kantornya terletak di Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110.

Hasil Penelitian

Berlandaskan dari perolehan studi yang sudah dilaksanakan oleh penulis, jadi bisa dikatakan catatan finansial yang telah disusun pada Satuan Kerja Direktorat Rumah Umum dan Komersial. Berawal dari periode 2015 pemerintahan implementasikan akuntansi *accrual basis* sama dengan anjuran PP No.71 tahun 2010 mengenai SAP (Afif & M. Yusuf, 2017). Laporan finansial *accrual basis* Satker Direktorat Perumahan Komersial mulai digunakan pada tahun 2016 sama dengan informasi Menteri PUPR No 01/SE/M/2016 mengenai peraturan akuntansi *accrual basis* pada laporan finansial serta laporan produk milik negara di Kementerian PUPR. Bentuk penyusunan catatan finansial secara *cash basis* serta *accrual basis* beserta perbandingannya.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013

SATUAN KERJA DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012					
URAIAN	CATATAN	TA 2013		% Terhadap Anggaran	TA 2012
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	772.213.244.876	1.893.404.541.039	245,19	1.331.979.615.033
Jumlah Pendapatan Negara		772.213.244.876	1.893.404.541.039	245,19	1.331.979.615.033
B. Belanja Negara	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	2.080.598.769.100	1.950.792.958.299	93,76	1.441.874.025.790
2. Belanja Barang	B.2.2	7.267.788.878.000	6.183.732.107.026	85,08	5.368.872.795.980
3. Belanja Modal	B.2.3	26.577.897.387.000	23.572.271.260.744	88,69	23.198.127.579.414
4. Belanja Modal Non Kas	B.2.4	-	11.463.603.059		77.740.606.750
Jumlah Belanja Negara		35.926.285.034.100	31.718.259.929.128	88,29	30.083.615.007.934

Bisa dilihat bahwa pendapatan pada basis kas LRA diakui dan ditulis saat uang diterima, sedangkan belanja atau beban diakui saat uang dibayarkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencatatan pendapatan dan beban dilakukan setelah uang diterima.

Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

SATUAN KERJA DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022		% Terhadap Anggaran	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	0	0,00	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0	0,00	0
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai					
Belanja Barang	B.3	24.036.199.000	23.494.747.004	92,07	27.634.511.927
Belanja Modal	B.4	22.500.000	21.496.000	88,18	939.267.872
Belanja Sosial					
Jumlah Beban Operasi		24.036.199.000	23.516.243.004	97,84	28.573.779.799
JUMLAH BELANJA		24.036.199.000	23.516.243.004	97,84	28.573.779.799

Berdasarkan LRA tahun 2022 dan 2021 di atas, yang ditunjukkan sebagai LRA dengan metode accrual basis setelah tahun 2015, menunjukkan bahwa komponen LRA terdiri dari pendapatan, belanja, atau pembiayaan. Metode pencatatan transaksi keuangan pada basis accrual mencatat transaksi pada saat transaksi terjadi, bukan saat uang benar-benar berpindah tangan. Dengan kata lain, jika digunakan metode *cash basis*, pendapatan dicatat saat uang diterima, tetapi pada *accrual basis*, pendapatan dicatat pada saat transaksi terjadi.

2. Neraca

Tabel 3 Neraca Tahun 2013

SATUAN KERJA DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2013	31 Desember 2012
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	1.167.058.545	810.754.169
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	10.121.153.259	19.029.872.722
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	424.616.684.680	3.329.183.847
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	193.152.487.378	161.040.871.847
Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum	C.1.5	25.023.013.699	0
Belanja Dibayar di Muka	C.1.6	219.863.167	160.596.995
Uang Muka Belanja	C.1.7	22.216.828.700	19.835.100.558
Piutang Bukan Pajak	C.1.8	167.358.155.328	146.322.771.124
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.1.9	-19.276.250.570	-28.407.901.233
Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	C.1.10	25.703.566.497	287.903.313.703
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi	C.1.11	-128.517.833	-215.000
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.12	2.656.899.000	1.617.931.020
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.13	-53.146.863	-47.951.843
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.14	0	42.357.400
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.1.15	0	-211.787
Persediaan	C.1.16	264.005.547.156	154.789.258.848
Persediaan Badan Layanan Umum		2.931.815.998	1.305.581.206
Jumlah Aset Lancar		1.119.714.158.321	767.731.313.306
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	57.388.535.368.980	50.201.701.857.731
Tanah Badan Layanan Umum		1.265.874.384.051	1.250.491.053.251
Peralatan dan Mesin	C.2.2	22.863.639.549.608	16.889.268.343.786
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum		1.064.403.552.977	750.047.580.208
Gedung dan Bangunan	C.2.3	9.579.087.072.196	7.819.752.237.038
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum		1.221.062.700.116	1.325.147.647.960
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	63.703.842.252.840	52.728.985.432.198
Jalan Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum		52.724.893.361	42.434.655.576
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	2.094.146.850.907	2.433.243.142.358
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum		17.400.241.482	13.053.457.585.229
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.6	28.032.064.309.662	25.113.457.585.229
Konstruksi dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum		12.505.118.867	56.216.277.370
Akumulasi Penyusutan		-43.788.081.734.756	0
Jumlah Aset Tetap		143.507.204.560.291	158.623.798.919.876
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	412.578.733	479.001.363
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-TP/TGR	C.3.2	-16.085.073	-1.653.997
Jumlah Piutang Jangka Panjang		396.493.660	477.347.365

Dewi Nisa Amaliah, M. Nur Afif, Ayi Jamaludin Aziz: Analisis Perbandingan Penerapan Cash Basis dengan Accrual Basis dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan

ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	2.130.288.135.264	1.886.541.933.297
Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum		76.395.841.868	42.026.303.393
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	C.4.2	16.045.930.645	0
Aset Lain-lain	C.4.3	2.000.823.341.710	2.142.196.518.442
Aset Lain-lain Badan Layanan Umum		3.143.062.801	1.009.825.900
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		-529.978.804.987	0
Jumlah Aset Lainnya		3.696.717.507.301	4.071.774.581.032
JUMLAH ASET		148.324.032.719.573	163.463.782.161.579
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	427.063.813.222	103.357.423.491
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.2	22.241.989.715	19.802.839.526
Uang Muka dari KPPN	C.5.3	1.167.058.545	810.754.169
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.5.4	10.124.795.498	19.102.564.776
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		460.597.565.980	143.073.581.962
JUMLAH KEWAJIBAN		460.597.565.980	143.073.581.962
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR	C.6		
Cadangan Piutang	C.6.1	176.260.705.739	407.430.093.384
Cadangan Persediaan	C.6.2	266.937.363.154	156.094.840.054
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang JK Pendek	C.6.3	-4.645.060.172	-103.181.868.640
Dana Lancar Badan Layanan Umum	C.6.4	218.175.501.077	161.040.871.577
Ekuitas Dana lancar lainnya	C.6.5	2.193.289.391	3.080.936.942
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.6.6	22.436.691.867	19.995.697.553
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.6.7	-22.241.989.715	-19.802.839.526
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		659.116.501.341	624.657.731.344
EKUITAS DANA INVESTASI	C.7		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7.1	143.507.560.291	158.623.798.919.876
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7.2	3.697.114.000.961	4.072.251.928.397
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		147.204.318.561.252	162.696.050.848.273
JUMLAH EKUITAS DANA		147.863.435.062.593	163.320.708.579.617
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		148.324.032.719.573	163.463.782.161.579

Dalam akuntansi berbasis kas, aset dan kewajiban tertentu, seperti utang usaha dan piutang usaha, tidak tercakup dalam neraca. Neraca berbasis kas hanya terdiri dari tiga komponen: aktiva, tanggungjawab serta hak pemilik. Akun-akun sudah termasuk pada neraca *cash basis* adalah uang tunai, ekuitas, dan pendapatan.

Tabel 4 Neraca Tahun 2022

SATUAN KERJA DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Piutang PNBPN	C.4	30.655.704.540	30.655.704.540
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang	C.7		
Bukan Pajak		-30.655.704.540	-30.655.704.540
Belanja Dibayar di Muka	C.8	0	0
Persediaan	C.9	1.149.203.305.629	1.390.993.163.631
persediaan yang Belum Diregister	C.10	0	0
Jumlah Aset Lancar		1.149.203.305.629	1.390.993.163.631
ASET TETAP			
Tanah	C.14	0	0
Peralatan dan Mesin	C.15	2.284.121.659	2.262.625.659
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		-1.261.545.740	-757.580.471
<i>Peralatan dan mesin (Netto)</i>		<i>1.022.575.919</i>	<i>1.505.045.188</i>
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	9.041.215.455	14.964.428.821
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.20	-5.876.790.062	-8.230.435.881
<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan (Netto)</i>		<i>3.164.425.393</i>	<i>6.733.992.940</i>
Jumlah Aset Tetap		4.187.001.312	8.239.038.128
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	882.500.000	882.500.000
Aset Lain-lain	C.22	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-882.500.000	-858.375.000
Jumlah Aset Lainnya		0	24.125.000
JUMLAH ASET		1.153.390.306.941	1.399.256.326.759
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.25	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	1.153.390.306.941	1.399.256.326.759
JUMLAH EKUITAS		1.153.390.306.941	1.399.256.326.759
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.153.390.306.941	1.399.256.326.759

Dalam akuntansi accrual, neraca terdiri dari akun-akun seperti uang tunai, ekuitas, pendapatan, biaya jual produk, pengeluaran, piutang usaha, aset tetap, aset lancar, hutang, dan kewajiban jangka panjang. *Cash basis* mencatat transaksi saat uang diterima, tetapi accrual basis mencatat transaksi saat transaksi terjadi. Pada basis kas, neraca dapat menyampaikan gagasan yang paling akurasi mengenai arus kas masuk

serta keluar daripada pada basis accrual, di mana setiap transaksi diwakili secara akurat, yang memudahkan analisis pola penjualan dan pengeluaran.

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Tabel 5 Laporan Arus Kas Tahun 2013

SATUAN KERJA DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL		
LAPORAN ARUS KAS		
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012"		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	Tahun 2013	Tahun 2012
ARUS MASUK		
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	257.035.445.985	237.364.505.118
Pendapatan Jasa Layanan	-	-
Pendapatan Hibah	-	-
Pendapatan APBN	480.605.324.965	467.283.107.872
Pendapatan Usaha Lainnya	12.022.936.217	7.813.219.892
Pembayaran Kas pada Pemasok	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
TOTAL KAS MASUK DARI AKTIVITAS OPERASI	749.663.707.167	712.460.219.892
ARUS KELUAR		
Biaya Layanan	-308.906.974.189	-271.181.676.911
Biaya Umum dan Administrasi	-137.937.988.087	-124.202.712.971
Biaya Lainnya	-	10.080.000
Pembelian Persediaan	-3.719.870	-422.457.620
Pembayaran Kepada Pemasok	-1.985.563.585	-1.760.357.099
Pembayaran Pajak	-87.660	-177.554.856
TOTAL KAS KELUAR DARI AKTIVITAS OPERASI	-448.834.333.391	-397.734.679.457
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	300.829.373.776	314.726.153.425
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS MASUK		
TOTAL KAS MASUK DARI AKTIVITAS INVESTASI	-	-
ARUS KELUAR		
Perolehan Aset Tetap	-240.734.261.694	-282.698.899.318
Perolehan Investasi Jangka Pendek	14.976.986.301	-40.000.000.000
Perolehan Investasi Jangka Panjang	-	-
Perolehan Aset Tak Berwujud	-	-
Pengadaan Persediaan	-	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-558.784.125	-2.056.205.040
TOTAL KAS KELUAR DARI AKTIVITAS INVESTASI	-226.316.059.518	-324.755.104.358
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-226.316.059.518	-324.755.104.358
ARUS KAS DARI AKTIVITAS IPENDANAAN		
ARUS MASUK		
TOTAL KAS MASUK DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-
ARUS KELUAR		
TOTAL KAS KELUAR DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	74.513.314.258	-10.028.950.933
KAS SETARA KAS AWAL	123.352.936.364	133.381.887.297
KAS SETARA KAS AKHIR	197.866.250.622	123.352.936.364

Laporan arus kas berbasis kas melengkapi catatan finansial *accrual basis* dengan tersajinya catatan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Catatan ini dibuat dengan mencatat transaksi saat kas diterima atau dibayarkan, bukan kapan transaksi terjadi. Catatan arus kas misalnya tiga komponen atau komponen kegiatan diantaranya akrual, pendanaan, dan pengoperasian. Perhitungan pendapatan bank mungkin lebih sulit dengan metode *cash basis* karena pengakuan pendapatan hanya dilakukan sampai kas diterima. Sedangkan pada *accrual basis* laporan arus kas tidak ada karena organisasi harus membuat laporan arus kas secara terpisah.

4. Laporan Operasional

Tabel 6 Laporan Operasional Tahun 2022

SATUAN KERJA DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	884.957.432	1.595.788.370
Beban Barang dan Jasa	D.4	11.226.209.976	14.223.846.398
Beban Pemeliharaan	D.5	133.102.569	153.346.203
Beban Perjalanan Dinas	D.6	11.256.358.642	11.662.018.256
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	247.707.189.753	90.491.502.571
Beban Bunga	D.8	0	0
Beban Subsidi	D.9	0	0
Beban Hibah	D.10	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.11	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.12	1.566.690.342	2.675.671.778
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.13	0	0
Beban Trasfer	D.14	0	0
Beban Lain-lain	D.15	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		272.774.508.714	120.802.173.576
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			
		-272.774.508.714	-120.802.173.576
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus /Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.16	0	
Pendapatan Pelepasan Aset non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.17	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.18		110.974.960
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.19		110.974.960

Diakuinya penghasilan serta biaya dalm catatan pengoperasian (LO) didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan dan kewajiban.

5. Laporan Kinerja Keuangan (LLK)

Hanya dalam CTA yang dapat ditemukan laporan kinerja keuangan. Laporan ini sifatnya opsional dan setidaknya-tidaknyanya tersajinya informasi misalnya saldo biaya bujet, penghasilan serta pengeluaran, total diakuinya dengan langsung pada ekuitas dan perbaikan penyimpangan dasar.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Tabel 7 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022

SATUAN KERJA DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

URAIAN	Catatan	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	1.399.256.326.759	1.039.889.034.024
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-272.774.508.714	-120.691.198.616
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	0	0
Persediaan Nilai Aset	E.5	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.6	0	-1.312.500
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.7		
Lain-lain	E.8	2.392.245.892	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.9	23.516.243.004	480.059.803.851
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.10	-245.866.019.818	359.367.292.735
EKUITAS AKHIR	E.11	1.153.390.306.941	1.399.356.326.759

Catatan berubahnya ekuitas pada *accrual basis* adalah catatan keuangan yang menunjukkan kenaikan ataupun penurunan kekayaan atau aktiva bersih sepanjang tahun waktu tertentu karena pelaksanaan *accrual basis* pada penghasilan serta pembiayaan. Laporan ini juga menunjukkan rekonsiliasi antara basis akrual dan basis kas.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK ialah catatan yang mengharuskan serta direkomendasikan oleh SAP dan penyikapan-penyikapan lain yang dibutuhkan dalam tersajinya yang benar atas catatan finansial. CaLK mencakup catatan mengenai kejelasan, jadwal detail ataupun analisa penilaian item yang tersajinya pada LRA, neraca, catatan pengoperasian serta catatan berubahnya ekuitas.

LRA pada waktu berakhirnya sampai dengan waktu 31 Desember 2021 tersusunnya serta tersajinya berlandaskan *cash basis*. Di sisi lain, neraca, catatan pengoperasian serta catatan berubahnya ekuitas dalam waktu yang berakhir sampai 31 Desember 2021 tersusun serta tersaji berdasarkan *accrual basis*.

Pembahasan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pada prinsipnya, pembuatan LRA pada basis tunai dan *accrual* sama. Karena LRA disajikannya berlansakan SAP berlandaskan akrual tersusun dan tersaji memakai bujet *cash basis* kas, itu sama dengan LRA yang disajikan berdasarkan SAP berbasis kas. Pendapatan (basis kas), belanja, transfer, dan pembiayaan adalah komponen LRA. Pengakuan pendapatan atau belanja dilakukan saat itu uang diterimanya di Rekening Kas Umum, serta dikeluarkannya dilakukan di waktu uang ditransfer di Rekening kas. Sesuai dengan Permendagri, Satker Direktorat Rumah Umum dan Komersial telah menyajikan LRA dengan basis tunai. Namun, di saat munculnya kepemilikan atas penghasilan serta pembiayaan, sebenarnya di dalam SAP juga diizinkan untuk menyajikan LRA dengan *basis accrual*. Hal ini sesuai penelitian (Trihani, 2018) dan (Nirwana & Suhadi, 2017) yang menunjukkan bahwa basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan basis *cash* dalam pengambilan keputusan internal pemerintah

Neraca

Pada catatan neraca adanya perbedaan antar *cash basis* serta *accrual basis* pada posisis ekuitas biaya. Pada *cash basis* ekuitas dibagi jadi 3 (tiga) ialah ekuitas biaya lancar, ekuitas pendanaan permodalan serta ekuitas pendanaan pencadangan. Sementara itu, di *accrual basis*, ekuitas diperuntikkan untuk kekayaan pemerintahan ialah variasi antar aktiva serta kewajiban di waktu catatan. Pada hal diakuinya *cash basis* serta *accrual basis* di catatan neraca ialah sama yaitu pengakuan aktiva di saat keadaan penggunaan perekonomian dimasa depan didapatkan pemerintahan serta memiliki penilaian ataupun beban yang bisa pengukuran yang sesuai.

Laporan Arus Kas (LAK)

LAK diperuntukan pada bagian yang memiliki maksud bendahara. Maka dalam Satker Direktorat Rumah Umum dan Komersial bisa dapat dijelaskan dengan bagian mempunyai bendahara komersial otonomi maka tersajinya LAK pada laporan. Pada *cash basis*, arus masuk serta arus keluar kas dikategorikan berlandaskan kegiatan pengoperasian, permodalan aktiva bukan finansial, biaya serta bukan bujet. Sementara pada *accrual basis* dikategorikan berlandaskan kegiatan pengoperasian permodalan, pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan studi (Putra, 2020) dan (Harahap, 2019) bahwa penerapan kinerja laporan keuangan berbasis kas berdasarkan pada kas masuk dan kas keluar saja, kemudian berbasis akrual meliputi penerapan atas pengidentifikasian, pengungkapan, pencatatan, pengukuran, laporan keuangan pokok.

Laporan Operasional (LO)

PSAP No. 12 tentang LO ditetapkannya dasar tersajinya LO pada pemerintahan untuk terpenuhinya maksud tanggung jawab terselenggaranya otoritas melalui penetapan pada aturan undang-undang. Pendapatan LO, pembiayaan serta defisit ataupun kekurangan pengoperasian instansi laporan menunjukkan aktivitas pengoperasian keuangan. Tujuan penyajian LO adalah untuk menyampaikan catatan mengenai aktivitas pengoperasian finansial. Dengan informasi yang disajikan pada LO dalam basis akrual, penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas serta neraca telah dilengkapi serta mempunyai hubungan yang bisa dipercayakan. Pengguna laporan keuangan dapat menggunakan informasi LO untuk penilaian penghasilan LO serta biaya dalam merealisasikan penghasilan LO serta biaya dalam mengoperasikan satu bagian ataupun semua instansi pemerintah. Penggunaan akuntansi akrual dalam penganggaran pemerintah untuk mencapai pengendalian yang efektif, mewujudkan efisiensi dan akuntabilitas (Wibowo et al., 2018).

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE dalam *cash basis* adalah catatan finansial yang sifatnya opsional yang tersaji pos seperti saldo pembiayaan anggaran yang melebihi atau berkurang. Tiap-tiap pos penghasilan serta pembelanjaan, bersama dengan jumlahnya seperti yang ditunjukkan melalui prosedur lainnya, pengakuan dengan langsung pada ekuitas. Di sisi lain, LPE pada *accrual basis* adalah catatan finansial utama dalam tersajinya pos seperti ekuitas pendahuluan, kekurangan LO selama tahun yang dimaksud, perubahan dengan langsung ditambahkan ataupun dikurangi ekuitas serta akuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

PSAP No 4 mengatur CaLK, yang aturannya tersaji serta diungkapkan yang dibutuhkan pada CaLK. CaLK mencakup kejelasan narasi atau uraian berdasarkan angka yang tertulis pada LRA, neraca serta LAK, serta catatan mengenai peraturan akuntansi digunakan pada instansi laporan. CaLK juga mencakup catatan tentang kebijakan akuntansi lainnya digunakan oleh entitas pelaporan. Maka pos pada neraca, LAK, LRA serta LO bisa memiliki rujukan silang mengenai catatan yang relevan pada CaLK.

5. SIMPULAN

Simpulan yang bisa diambil dari studi ini ialah Satker Direktorat Rumah Umum dan Komersial dalam penerapan cash basis menyajikan 4 (empat) seperti misalnya ialah catatan utama terdiri atas catatan Realisasi bujet (LRA), Neraca, catatan Arus Kas (LAK) serta Catatan atas Laporan finansial (CaLK). Sementara catatan lainnya diantaranya catatan performa pegawai (LKK) serta catatan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan penyajian dalam accrual basis ada 5 (lima) unsur pelaporan finansial utama yang sudah diatur oleh SAP ialah catatan Realisasi bujet (LRA), Neraca, catatan pengoperasian (LO), catatan Perubahan Ekuitas (LPE) serta dokumentasi atas catatan finansial (CaLK).

Pada penyajian catatan finansial Satker Direktorat Rumah Komersial yang menggunakan cash basis, ada pada catatan kinerja finansial yang bukan ada pada accrual basis. Sementara accrual basisi juga mempunyai catatan saldo anggaran lebih serta catata pengoperasian yang bukan tersaji pada catatan dengan memakai cash basis. Perbandingan lain ialah di LRA serta neraca pada tersajinya catatan finansial ialah LRA memakai cash basis, sementara pada neraca sudah memakai accrual basis

Saran

Saran dapat penulis sampaikan sebagai masukan penelitian lanjutan yaitu:

1. Satker Direktorat Rumah Umum dan Komersial seharusnya menambahkan SDM supaya lebih baik pada pengenalan pelaksanaan *accrual basis* dalam mempersiapkan pelaksanaannya lebih baik.
2. Agar dapat terbiasa dengan pelaksanaan catatan finansial *accrual basis* seharusnya SDM yang ditanganinya laporan keuangan sudah melakukan training secara berkala untuk membantu dalam penerapan sistem akuntansi di lembaga pemerintahan agar paling baik.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, M. N., & Yusuf, M. (2017). Analisis laporan keuangan rumah sakit berdasarkan KMK Nomor 1981 Tahun 2010 pada RSUD Cimacan. *Jurnal Akunida*, 3(2).

Baswir, R. (2000). *Koperasi Indonesia* (1st ed.). Penerbit Andi.

Cudia, C. P. (2008). Application of accrual and cash accounting: Implications for small and medium enterprises in Metro Manila. *DLSU Business & Economics Review*, 17(1).

Harahap, R. W. (2019). Analisis perbandingan penerapan cash toward accrual dengan accrual basis dalam penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Medan. *Jurnal Ekonomi*

Bisnis, 15(2).

Joko, M., Supardi, A., & Susandra, F. (2019). Tingkat kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan pendapatan asli daerah: Kajian pada Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akunida*, 5(2).

Khatami, F. H., Lasmana, A., & Hambani, S. (2024). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan PSAP Nomor 07 pada pemerintah daerah Kota Serang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7).

Listiani, S. R., Afif, M. N., & Aziz, A. J. (2017). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi tahun 2011-2021. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(5).

Nirwana, E., & Suhadi, J. (2017). Analisis basis cash towards accrual pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012-2014. *AS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 1(1).

Putra, R. M. (2020). Analisis perbandingan kinerja laporan keuangan berbasis kas dan akrual studi pada UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. *STIE Mahardhika Surabaya*.

Setiawan, A. B., & Avrilivanni, C. (2020). Analisis pengukuran kinerja pada pemerintah daerah. *Jurnal Akunida*, 6(1).

Setiawan, A. B., & Surtini, E. (2017). Analisis kontribusi dan efektivitas sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Akunida*, 3(1).

Setiawan, A. B., & Tami, R. P. (2018). Pengaruh penerapan SAP dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bogor dengan kompetensi SDM sebagai variabel moderating. *Jurnal Akunida*, 4(1).

Simanjuntak, B. (2005). Menyongsong era baru akuntansi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 1(1).

Sudaryati, P. (2020). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1).

Trihani, I. (2018). Analisis manfaat basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD di Kota Solok). *Jurnal Bisnis*, 16(2).

Wibowo, O., Aisha Aji, T., Rahmadhanti, W., & Sugiarto. (2018). Analisis pendapatan accrual basis dan cash basis dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. *SCA: Proceeding International Conference Sustainable Competitive Advantage*, 8(1).